



Rencana Kerja Perubahan 2020

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431

S U M B E R



KATA PENGANTAR

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja perubahan yang ditetapkan. Pada tahun 2020 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sumber, Juli 2020

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	19
2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi	20
2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	23
1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e- government	25
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis TIK	25
3.2. Tujuan dan Sasaran	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV PENUTUP.....	30
LAMPIRAN- LAMPIRAN	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2019-2024.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah mencapai visi Kabupaten Cirebon yaitu :



“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



- Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan pelaksana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja perubahan yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab Cirebon.



2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Cirebon

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

RENJA PERUBAHAN 2020



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2019 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp217.850.949.000,00 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp213.572.238.616,00 atau sebesar 98,04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
DATA REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2019
DAN TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Target 2019 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp.)	Persen %	Target 2020
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	217.850.949.000	213.572.238.616	98,04	201.841.723.000
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	217.850.949.000	213.572.238.616	98,04	201.841.723.000
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	217.850.949.000	213.572.238.616	98,04	201.841.723.000
1.1.1.01.	Pajak Hotel	6.732.497.000	7.337.719.958	108,99	5.632.123.000
1.1.1.02.	Pajak Restoran	16.108.147.000	18.475.733.000	114,70	13.639.888.000
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.612.957.000	1.643.946.844	101,92	1.001.467.000
1.1.1.04.	Pajak Reklame	4.500.000.000	4.532.777.295	100,73	4.473.140.000
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	72.787.348.000	74.039.490.635	101,72	65.107.500.000
1.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000.000	11.385.438.581	94,88	11.707.975.000
1.1.1.07.	Pajak Parkir	600.000.000	638.493.718	106,42	414.000.000
1.1.1.08.	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000	1.162.870.200	122,41	1.074.630.000
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000	61.221.000	102,04	60.000.000
1.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan	42.500.000.000	47.247.561.827	111,17	43.281.000.000
1.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60.000.000.000	47.046.985.558	78,41	55.450.000.000
JUMLAH PAJAK DAERAH		217.850.949.000	213.572.238.616	98,04	201.841.723.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp6.732.497.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.337.719.958,00 atau 108,99%. Realisasi



penerimaan pajak hotel yang melebihi target disebabkan antara lain : adanya wajib pajak baru diantaranya hotel bintang empat yaitu Hotel Patra Jasa yang mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2019, dan penambahan wajib pajak hotel dari tempat kos.

2. Pajak Restoran

Target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp16.108.147.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.475.733.000,00 atau 114,70%. Realisasi penerimaan Pajak Restoran yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya ekstensifikasi wajib pajak restoran cepat saji dalam bentuk franchise yang bersekala internasional yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.
- ✓ Adanya wajib pajak baru restoran hotel yang pembayarannya signifikan.
- ✓ Adanya kegiatan intensifikasi dengan menempatkan checker restoran yang berimbas pada penggunaan cash register pada pembayaran pajak restoran. Sehingga pembayaran pajak yang semula dilakukan secara flat menjadi sesuai dengan omzet.
- ✓ Adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tahun 2017 hasil temuan BPK yang dibayar pada tahun 2019

3. Pajak Hiburan

Target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp1.612.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.643.946.844,00 atau 101,92%. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang melebihi target disebabkan antara lain :



adanya wajib pajak baru tontonan dalam gedung (bioskop) yang berskala nasional yang beroperasi di Kabupaten Cirebon

4. Pajak Reklame

Target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.532.820.495,00 atau 100,73%. Realisasi penerimaan Pajak Reklame yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya ekstensifikasi terhadap objek pajak baru reklame kendaraan berjalan
- ✓ Pajak reklame kendaraan berjalan yang sebelumnya ditetapkan di daerah lain pada tahun 2019 ditetapkan di kabupaten Cirebon karena aktivitasnya di wilayah kabupaten Cirebon

5. Pajak Penerangan Jalan

Target penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp72.787.348.000,00 dan terealisasi sebesar Rp74.039.490.635,00 atau 101,72%. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya pelanggan PLN baru
- ✓ Adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik



6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.385.438.581,00 atau 94,88%. Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak mencapai target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya Wajib Pajak yang tutup/ tidak memperpanjang ijin operasi produksi,
- ✓ Adanya Wajib Pajak yang tutup sementara karena perpanjangan ijin operasi produksi masih dalam proses
- ✓ Belum optimalnya pembangunan kawasan industri di Kabupaten Cirebon, sehingga pemasaran produk MBLB tidak maksimal

7. Pajak Parkir

Target penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp638.493.718,00 atau 106,42%. Realisasi penerimaan Pajak Parkir yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tahun 2017 hasil temuan BPK yang dibayar pada tahun 2019
- ✓ Intensifikasi pajak melalui penempatan petugas checker pada obyek pajak parkir.

8. Pajak Air Tanah

Target penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.162.870.200,00 atau 122,41%. Realisasi



penerimaan Pajak Air Tanah yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya ekstensifikasi wajib pajak baru
- ✓ Banyaknya wajib pajak yang semula pembayarannya flat, telah disarankan untuk beralih menggunakan meteran air sehingga hitungan pajaknya berdasarkan volume penggunaan air.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.221.000,00 atau 102,02%. Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang melebihi target karena adanya penurunan target yang awalnya sebesar Rp100.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00. Hal tersebut disebabkan banyaknya alih fungsi gedung sarang walet

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp60.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.046.985.558,00 atau 78,41%. Realisasi penerimaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak mencapai target disebabkan antara lain :

- ✓ Pertimbangan Teknis (Pertek) BPN untuk pengembang perumahan sampai akhir tahun 2019 belum terbit



- ✓ Kuota untuk perumahan bersubsidi di Kabupaten Cirebon sudah habis sejak Bulan Agustus 2019
- ✓ Penetapan target BPHTB yang terlalu tinggi dan sulit untuk diprediksi.

11. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp42.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.247.561.827,00 atau 117,17%. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi target disebabkan antara lain :

- ✓ Adanya perubahan dan penambahan objek pajak yang menyebabkan bertambahnya ketetapan PBB
- ✓ Adanya pembayaran piutang PBB sebagai salah satu syarat perubahan subyek dan wajib pajak PBB
- ✓ Dilaksanakannya monitoring dan audit penerimaan PBB oleh Inspektorat terhadap desa-desa yang belum lunas sampai dengan 30 Nopember 2019
- ✓ Adanya penghapusan sanksi administrasi PBB tahun pajak 2019 s.d. 31 Desember 2019

Realisasi penerimaan PBB tahun 2019 sebesar Rp47.247.561.827,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp41.218.082.912,00, mengalami peningkatan sebesar Rp6.029.478.915,00 atau 14,63%.



Desa lunas PBB pada tahun 2019 sebanyak 317 desa, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 desa lunas PBB sebanyak 305 desa atau meningkat 12 desa.

Kecamatan lunas PBB pada tahun 2019 sebanyak 18 kecamatan, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 kecamatan lunas PBB sebanyak 15 kecamatan atau meningkat 3 kecamatan.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan undian Umroh bagi Desa Lunas PBB tahun 2019, untuk 40 desa yang memenuhi kategori yang telah ditentukan.

Secara kumulatif realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp213.572.238.616,00 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.676.226.670,00 atau 2,73% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp207.896.011.946,00.

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sebesar Rp30.062.999.900,00 terdiri dari anggaran belanja langsung sebesar Rp12.255.531.850,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp17.807.467.950,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
ANGGARAN BELANJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	PERSEN (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.807.467.950	16.062.364.333	1.745.103.617	90,20%
BELANJA LANGSUNG	12.255.531.850	10.403.126.543	1.852.405.307	84,89%
JUMLAH	30.062.999.800	26.465.490.876	3.597.508.924	88,03%



Anggaran belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019

No	URAIAN	ANGGARAN ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5 = (4/3)	6 = (3-4)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		17.807.467.950	16.062.364.333	90,20	1.745.103.617
1	Belanja Pegawai	17.807.467.950	16.062.364.333	90,20	1.745.103.617
1	Gaji dan Tunjangan	4.987.150.500	4.751.772.567	95,28	235.377.933
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.856.566.000	3.680.789.600	95,44	175.776.400
	Tunjangan Keluarga	416.059.000	396.863.162	95,39	19.195.838
	Tunjangan Jabatan	200.228.000	189.750.000	94,77	10.478.000
	Tunjangan Fungsional	26.879.000	21.415.000	79,67	5.464.000
	Tunjangan Umum	152.031.000	146.000.000	96,03	6.031.000
	Tunjangan Beras	223.090.500	209.873.160	94,08	13.217.340
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.322.000	2.311.245	99,54	10.755
	Pembulatan Gaji	61.000	52.923	86,76	8.077
	Asuransi Kesehatan	109.914.000	104.717.477	95,27	5.196.523
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.927.770.000	1.705.220.000	88,46	222.550.000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.927.770.000	1.705.220.000	88,46	222.550.000
3	Biaya Pemungutan Pajak	10.892.547.450	9.605.371.766	88,18	1.287.175.684
	Belanja Pajak	10.892.547.450	9.605.371.766	88,18	1.287.175.684

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp12.255.531.850,00 dan terealisasi sebesar Rp10.403.126.543,00 atau 84,89% dipergunakan untuk membiayai sebanyak 7 (tujuh) program dan 45 kegiatan, dengan rincian dalam tabel berikut :



Tabel 4
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5 = (4/3)
BELANJA LANGSUNG		12.255.531.850	10.403.126.543	84,89
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.125.472.150	895.687.690	79,58
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.836.000	194.334.771	69,20
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.500.000	9.581.500	49,14
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	249.750.000	177.528.318	71,08
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.729.300	108.257.400	99,57
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.370.600	60.356.100	99,98
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	11.252.200	10.480.300	93,14
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.438.100	151.006.089	75,72
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.659.500	26.375.700	98,94
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.240.000	51.240.000	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.600.000	35.660.000	87,83
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	53.101.350	46.888.112	88,30
12	Penataan Arsip	23.995.100	23.979.400	99,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.202.962.700	1.619.599.703	73,52
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	285.200.000	216.500.000	75,91
2	Pengadaan Mebeleur	46.997.200	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	546.218.000	445.766.000	81,61
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	218.200.000	183.049.703	83,89
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	39.781.000	36.541.000	91,86
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	397.535.000	367.389.000	92,42
7	Pengadaan Komputer dan Jaringan	669.031.500	370.354.000	55,36
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79.956.000	74.843.000	93,61
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	79.956.000	74.843.000	79,94



No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5 = (4/3)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67.710.800	58.086.200	85,79
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.750.600	33.126.000	77,49
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	11.859.700	11.859.700	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.100.500	13.100.500	100,00
5	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	107.999.800	26.981.600	24,98
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	107.999.800	26.981.600	79,94
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.606.695.700	7.668.521.150	89,10
1	Peningkatan dan Penerimaan 5 Jenis Pajak (Pajak BPHTB, PBB, SBW, PPJ dan PAT)	550.000.000	546.053.500	99,28
2	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak	83.212.800	79.912.800	96,03
3	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	149.701.600	124.831.200	83,39
4	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	86.215.900	80.007.000	92,80
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	59.639.100	50.845.500	85,26
6	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	116.112.500	87.112.500	75,02
7	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah	57.090.500	23.924.500	41,91
8	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	405.712.200	270.851.200	66,76
9	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	120.919.200	113.369.900	93,76
10	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Restoran pada SKPD	149.941.600	148.171.600	98,82
11	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	135.000.000	134.955.000	99,97
12	Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran	144.984.300	139.621.900	96,30
13	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan 6 Jenis Pajak Daerah	242.256.600	238.756.600	98,56
14	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	69.794.700	69.794.700	100,00
15	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	394.999.900	393.339.900	99,58
16	Peningkatan Pelayanan 6 Jenis Pajak Daerah	391.831.400	391.716.400	99,97



No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5 = (4/3)
17	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	268.530.000	268.114.000	99,85
18	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	332.389.200	308.252.000	92,74
19	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	3.606.537.100	3.087.549.100	85,61
20	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	787.327.800	738.660.050	93,82
21	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	454.499.300	372.681.800	79,94
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	64.734.700	59.407.200	91,77
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	64.734.700	59.407.200	79,94
JUMLAH BELANJA		12.255.531.850	10.403.126.543	84,89

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp3.584.101.450,00 dan terealisasi sebesar Rp2.675.198.193,00 sisa sebesar Rp908.903.257,00 atau tercapai sebesar 74,64%.

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp8.606.695.700,00 dan terealisasi sebesar Rp7.668.521.150,00 sisa sebesar Rp938.174.550,00 atau tercapai sebesar 89,10%.



Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp64.734.700,00 dan terealisasi sebesar Rp59.407.200,00 sisa sebesar Rp5.327.500,00 atau tercapai sebesar 91,77%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan target komposisi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20 %.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2019.



**Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 s.d 2019**

PENINGKATAN REALISASI PAJAK DAERAH PERTAHUN (Rp)		%	PENINGKATAN REALISASI PAJAK DAERAH SEBESAR TIAP TAHUN 15% (RENSTRA AWAL)	KETERANGAN
PENJELASAN / FORMULASI	Realisasi tahun berjalan dikurangi realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya			
TAHUN 2013	TARGET PAJAK DAERAH	76.652.966.000,00	106,48	-
	REALISASI PAJAK DAERAH	81.617.720.438,00		
TAHUN 2014	TARGET PAJAK DAERAH	115.622.210.000,00	104,14	47,52
	REALISASI PAJAK DAERAH	120.405.178.674,00		
TAHUN 2015	TARGET PAJAK DAERAH	129.000.000.000,00	108,05	15,76
	REALISASI PAJAK DAERAH	139.383.796.966,00		
TAHUN 2016	TARGET PAJAK DAERAH	145.000.000.000,00	109,09	13,49
	REALISASI PAJAK DAERAH	158.183.197.396,00		
KOMPOSISI REALISASI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD (Rp)		REALISASI PAJAK DAERAH 20% DARI PAD (RENSTRA PERUBAHAN)		KETERANGAN
PENJELASAN / FORMULASI	Jumlah realisasi pajak daerah tahun berjalan dibagi realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dikali 100			
TAHUN 2017	REALISASI PAD	639.169.589.721,85	29,12	TERCAPAI
	REALISASI PAJAK DAERAH	186.138.563.149,00		
TAHUN 2018	REALISASI PAD	755.966.744.169,60	27,50	TERCAPAI
	REALISASI PAJAK DAERAH	207.896.011.946,00		
TAHUN 2019	REALISASI PAD	639.806.097.586,19	33,38	TERCAPAI
	REALISASI PAJAK DAERAH	213.572.238.616,00		

2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian dan kegiatan pertambangan mineral.

Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon bidang pajak daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak



daerah tiap tahun rata-rata 14,66% serta meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indeks kepuasan masyarakat 83%.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 yaitu:

- a. Beroperasinya jalan Tol Cikapali serta pembangunan Bandara Kertajati memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah.
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berinvestigasi berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- c. Adanya kebijakan Zero alkohol di wilayah Kota Cirebon yang membuka peluang berkembangannya tempat hiburan di Kabupaten Cirebon.
- d. Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan sektor ekonomi secara global.

Dalam era otonom daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- a. Beroperasinya jalan Tol Cikapali memberikan pengaruh terhadap keberadaan rumah makan di sepanjang jalan pantura yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak restoran.



- b. Tunggakan pembayaran pajak daerah yang masih belum terselesaikan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- d. Pandemi covid-19 yang berpengaruh pada roda perekonomian menyebabkan menurunnya penerimaan pajak daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon akan menambah usulan program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan kebijakan daerah dan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

1. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2014 Kementerian Keuangan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan



daerah khusus/ daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

- b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui: 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pandemi Covid-19 yang berimplikasi antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan Negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan.



Instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang berimplikasi juga pada penurunan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

b. Kebijakan Provinsi

Salah satu Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Sasaran ini akan diwujudkan dengan melaksanakan strategi meningkatkan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam dua arah kebijakan yaitu :

1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis TIK

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan;
2. Meningkatnya kinerja dinas dalam pelayanan masyarakat wajib pajak.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ada 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Dari program-program tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan;
- c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;



- e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan;
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - l. Penataan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - e. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung kantor;
 - f. Pengadaan Komputer dan Jaringan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;



- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor;
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan sektoral.
 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak;
 - b. Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang);
 - e. Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah;
 - f. Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah;
 - g. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - h. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah;
 - i. Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
 - j. Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
 - k. Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Logam Bukan Batuan serta Reklame;
 - l. Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB;
 - m. Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- n. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
 - o. Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
 - p. Peningkatan Pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
 - q. Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan;
 - r. Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - s. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;
 - t. Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

Agar rencana kerja perubahan ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2020

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001





RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 4.02.02. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
0.	NON URUSAN							2.089.938.400	1.673.716.300	0	0	1.673.716.300	(416.222.100)
0.00.	NON BIDANG URUSAN							2.089.938.400	1.673.716.300	0	0	1.673.716.300	(416.222.100)
0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi SKPD	100 Persen	100 Persen	938.729.700	692.506.500	0	0	692.506.500	(246.223.200)
0.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Jumlah jenis tagihan rekening	3 jenis	3 jenis	280.836.000	280.836.000	0	0	280.836.000	0
0.00.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Jumlah Surat Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Sah	66 unit	66 unit	17.950.000	17.950.000	0	0	17.950.000	0
0.00.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Tersedianya peralatan kerja siap pakai	8 Jenis	8 Jenis	259.950.000	81.500.000	0	0	81.500.000	(178.450.000)
0.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	58 Jenis	58 Jenis	100.365.400	99.705.400	0	0	99.705.400	(660.000)
0.00.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Foto Copy)	17 Jenis	17 Jenis	47.611.300	46.371.100	0	0	46.371.100	(1.240.200)
0.00.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan kantor	6 Jenis	6 Jenis	8.116.200	7.229.300	0	0	7.229.300	(886.900)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
0.00.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	49.853.000	0	0	0	0	(49.853.000)
0.00.01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	28 Jenis	28 Jenis	21.360.800	42.510.800	0	0	42.510.800	21.150.000
0.00.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak lokal dan regional	3 Jenis	3 Jenis	51.240.000	51.240.000	0	0	51.240.000	0
0.00.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Jenis	12 Jenis	49.440.000	30.220.000	0	0	30.220.000	(19.220.000)
0.00.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Jenis	12 Jenis	32.025.000	21.033.000	0	0	21.033.000	(10.992.000)
0.00.01.30.	Penataan Arsip			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Yang Handal	12 Jenis	12 Jenis	19.982.000	13.910.900	0	0	13.910.900	(6.071.100)
0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	100 Prosen	1.060.844.200	893.944.000	0	0	893.944.000	(166.900.200)
0.00.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terbangunnya Gedung / Kantor	1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	0	0
0.00.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terpenuhinya Alat Angkutan Darat	4 Unit	4 Unit	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
0.00.02.10.	Pengadaan Mebeleur			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Perlengkapan Meubeler Kantor	18 Buah	18 Buah	0	0	0	0	0	0
0.00.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terpeliharanya Gedung/Kantor	12 Jenis	12 Jenis	499.514.200	384.000.000	0	0	384.000.000	(115.514.200)
0.00.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	48 Buah	48 Buah	221.800.000	221.800.000	0	0	221.800.000	0
0.00.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terpeliharanya Perlengkapan gedung/kantor dan genset	12 Jenis	12 Jenis	40.500.000	30.250.000	0	0	30.250.000	(10.250.000)
0.00.02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terbangunnya Ruangan Pelayanan Pajak UPT Barat, UPT Tengah dan UPT Timur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	4 Paket	4 Paket	75.900.000	35.900.000	0	0	35.900.000	(40.000.000)
0.00.02.45.	Pengadaan Komputer dan Jaringan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Terlaksananya Pengadaan Komputer	21 Jenis	21 Jenis	223.130.000	221.994.000	0	0	221.994.000	(1.136.000)
0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	100 Prosen	0	0	0	0	0	0
0.00.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	Tersedianya Pakaian PDH Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon Beserta Kelengkapannya	122 Buah	122 Buah	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
0.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-		Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	100 Prosen	44.599.700	41.640.300	0	0	41.640.300	(2.959.400)
0.00.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terlaksananya Penyusunan Dok LAKIP dan Laporan Rutin Bulanan	2 Dok	2 Dok	23.993.200	23.640.500	0	0	23.640.500	(352.700)
0.00.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok	1 Dok	7.355.600	7.249.100	0	0	7.249.100	(106.500)
0.00.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terseusunya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	1 Buah	1 Buah	13.250.900	10.750.700	0	0	10.750.700	(2.500.200)
0.00.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	-	-		Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	100 Prosen	45.764.800	45.625.500	0	0	45.625.500	(139.300)
0.00.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis	5 Dok	5 Dok	45.764.800	45.625.500	0	0	45.625.500	(139.300)
4.	URUSAN / FUNGSI PENUNJANG							7.779.774.400	3.355.859.000	0	0	3.355.859.000	(4.423.915.400)
4.02.	KEUANGAN							7.715.071.700	3.342.218.300	0	0	3.342.218.300	(4.372.853.400)
4.02.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah tiap tahun	11,23 Prosen	11,23 Prosen	7.715.071.700	3.342.218.300	0	0	3.342.218.300	(4.372.853.400)
4.02.15.109.	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terbinanya Petugas UPT dan Wajib Pajak Air Tanah	110 Orang	110 Orang	81.522.100	17.758.300	0	0	17.758.300	(63.763.800)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
4.02.15.110.	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Tersusunnya Laporan 5 Jenis Pajak	5 Dok	5 Dok	188.809.000	152.188.000	0	0	152.188.000	(36.621.000)
4.02.15.111.	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	100 Prosen	100 Prosen	109.600.000	82.944.400	0	0	82.944.400	(26.655.600)
4.02.15.113.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Tersusunnya Monitoring Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	53.675.200	47.551.300	0	0	47.551.300	(6.123.900)
4.02.15.114.	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang Pajak Daerah	1 Kali	1 Kali	115.318.500	101.808.000	0	0	101.808.000	(13.510.500)
4.02.15.115.	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Daerah	100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	50.141.500	0	0	0	0	(50.141.500)
4.02.15.116.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	9 Jenis Pajak	9 Jenis Pajak	336.509.400	166.178.600	0	0	166.178.600	(170.330.800)
4.02.15.117.	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	102.091.700	46.800.000	0	0	46.800.000	(55.291.700)
4.02.15.119.	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Data CWP Hasil Penjaringan dan Data Potensi 6 Jenis Pajak Daerah	100 CWP	100 CWP	137.000.000	57.624.000	0	0	57.624.000	(79.376.000)
4.02.15.123.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Tersedianya Data Piutang Pajak Daerah	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	72.000.000	43.700.000	0	0	43.700.000	(28.300.000)
4.02.15.124.	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame			Kabupaten Cirebon	Terseleenggaranya Pelaksanaan Reward Terhadap Wajib Pajak	50 WP	50 WP	440.000.000	104.406.700	0	0	104.406.700	(335.593.300)
4.02.15.134.	Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB			Kabupaten Cirebon	Tercapainya Penerimaan Pajak BPHTB	100 Prosen	100 Prosen	550.000.000	95.848.600	0	0	95.848.600	(454.151.400)
4.02.15.135.	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Kabupaten Cirebon	Terlatihnya Wajib Pungut Pajak Daerah	400 Orang	400 Orang	183.515.100	0	0	0	0	(183.515.100)
4.02.15.136.	Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Terlatihnya Wajib Pajak Daerah	150 Orang	150 Orang	208.777.000	115.122.200	0	0	115.122.200	(93.654.800)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu dan Sumber Pendanaan					
					Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						Sebelum	Setelah		PUD	BanProv	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10+11+12)	14=(13-9)
4.02.15.137.	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	245.000.000	135.042.000	0	0	135.042.000	(109.958.000)
4.02.15.138.	Kajian Pemetaan Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Bantuan serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Tersedianya Data, Peta dan Aplikasi Yang berisi Objek Pajak, Calon Wajib Pajak dan Potensi Pajak	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	0	0	0	0	0	0
4.02.15.139.	Peningkatan Pelayanan Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	215.669.400	131.920.300	0	0	131.920.300	(83.749.100)
4.02.15.65.	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Terpilihnya Wajib Pajak Teladan	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	241.677.000	0	0	0	0	(241.677.000)
4.02.15.66.	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Operasi Terpadu Penerimaan Pajak Daerah	4 Kali	4 Kali	296.418.900	128.007.200	0	0	128.007.200	(168.411.700)
4.02.15.71.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Sosialisasi Rutin	12 Bulan	12 Bulan	3.300.000.000	1.400.627.700	0	0	1.400.627.700	(1.899.372.300)
4.02.15.72.	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah			Kabupaten Cirebon	Pemutakhiran Basis Data Pbb	100 Porsen	100 Porsen	787.346.900	514.691.000	0	0	514.691.000	(272.655.900)
4.02.15.78.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Kabupaten Cirebon	Tersajinya Data Piutang PBB	1 Dok	1 Dok	0	0	0	0	0	0
4.07.	PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH							64.702.700	13.640.700	0	0	13.640.700	(51.062.000)
4.07.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-		Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah	100 Prosen	100 Prosen	64.702.700	13.640.700	0	0	13.640.700	(51.062.000)
4.07.26.02.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan				Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	64.702.700	13.640.700	0	0	13.640.700	(51.062.000)
J U M L A H								9.869.712.800	5.029.575.300	0	0	5.029.575.300	(4.840.137.500)



RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 4.02.02. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
0.	NON URUSAN					2.089.938.400	1.673.716.300	(416.222.100)		
0.00.	NON BIDANG URUSAN					2.089.938.400	1.673.716.300	(416.222.100)		
0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi SKPD		100 Persen	100 Persen	938.729.700	692.506.500	(246.223.200)		
0.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	3 jenis	3 jenis	280.836.000	280.836.000	-	PIS	PIS
0.00.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Surat Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Sah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	66 unit	66 unit	17.950.000	17.950.000	-	PIS	PIS
0.00.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja siap pakai	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	8 Jenis	8 Jenis	259.950.000	81.500.000	(178.450.000)	PIS	PIS
0.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	58 Jenis	58 Jenis	100.365.400	99.705.400	(660.000)	PIS	PIS
0.00.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Foto Copy)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	17 Jenis	17 Jenis	47.611.300	46.371.100	(1.240.200)	PIS	PIS
0.00.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	6 Jenis	6 Jenis	8.116.200	7.229.300	(886.900)	PIS	PIS
0.00.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	9 Jenis	9 Jenis	49.853.000	-	(49.853.000)	PIS	
0.00.01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	28 Jenis	28 Jenis	21.360.800	42.510.800	21.150.000	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
0.00.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak lokal dan regional	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	3 Jenis	3 Jenis	51.240.000	51.240.000	-	PIS	PIS
0.00.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	12 Jenis	12 Jenis	49.440.000	30.220.000	(19.220.000)	PIS	PIS
0.00.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	12 Jenis	12 Jenis	32.025.000	21.033.000	(10.992.000)	PIS	PIS
0.00.01.30.	Penataan Arsip	Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Yang Handal	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	12 Jenis	12 Jenis	19.982.000	13.910.900	(6.071.100)	PIS	PIS
0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	100 Prosen	1.060.844.200	893.944.000	(166.900.200)		
0.00.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung / Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	1 Paket	1 Paket	-	-	-		
0.00.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Alat Angkutan Darat	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	4 Unit	4 Unit	-	-	-		
0.00.02.10.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Perlengkapan Meubeler Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	18 Buah	18 Buah	-	-	-		
0.00.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung/Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	12 Jenis	12 Jenis	499.514.200	384.000.000	(115.514.200)	PIS	PIS
0.00.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	48 Buah	48 Buah	221.800.000	221.800.000	-	PIS	PIS
0.00.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung/kantor dan genset	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	12 Jenis	12 Jenis	40.500.000	30.250.000	(10.250.000)	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
0.00.02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terbangunnya Ruang Pelayan Pajak UPT Barat, UPT Tengah dan UPT Timur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	4 Paket	4 Paket	75.900.000	35.900.000	(40.000.000)	PIS	PIS
0.00.02.45.	Pengadaan Komputer dan Jaringan	Terlaksananya Pengadaan Komputer	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	21 Jenis	21 Jenis	223.130.000	221.994.000	(1.136.000)	PIS	PIS
0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
0.00.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian PDH Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon Beserta Kelengkapannya	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kab. Cirebon	122 Buah	122 Buah	-	-	-		
0.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas, efesiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	100 Prosen	44.599.700	41.640.300	(2.959.400)		
0.00.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dok LAKIP dan Laporan Rutin Bulanan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	2 Dok	2 Dok	23.993.200	23.640.500	(352.700)	PIS	PIS
0.00.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	1 Dok	1 Dok	7.355.600	7.249.100	(106.500)	PIS	PIS
0.00.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terseusunya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	1 Buah	1 Buah	13.250.900	10.750.700	(2.500.200)	PIS	PIS
0.00.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan kualitas, efesiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	100 Prosen	45.764.800	45.625.500	(139.300)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
0.00.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	5 Dok	5 Dok	45.764.800	45.625.500	(139.300)	PIS	PIS
4.	URUSAN / FUNGSI PENUNJANG					7.779.774.400	3.355.859.000	(4.423.915.400)		
4.02.	KEUANGAN					7.715.071.700	3.342.218.300	(4.372.853.400)		
4.02.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah tiap tahun		11,23 Prosen	11,23 Prosen	7.715.071.700	3.342.218.300	(4.372.853.400)		
4.02.15.109.	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak	Terbinanya Petugas UPT dan Wajib Pajak Air Tanah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	110 Orang	110 Orang	81.522.100	17.758.300	(63.763.800)	PIS	PIS
4.02.15.110.	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	Tersusunnya Laporan 5 Jenis Pajak	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	5 Dok	5 Dok	188.809.000	152.188.000	(36.621.000)	PIS	PIS
4.02.15.111.	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100 Prosen	109.600.000	82.944.400	(26.655.600)	PIS	PIS
4.02.15.113.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	Tersusunnya Monitoring Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	53.675.200	47.551.300	(6.123.900)	PIS	PIS
4.02.15.114.	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	1 Kali	1 Kali	115.318.500	101.808.000	(13.510.500)	PIS	PIS
4.02.15.115.	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah	Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	50.141.500	-	(50.141.500)	PIS	
4.02.15.116.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	9 Jenis Pajak	9 Jenis Pajak	336.509.400	166.178.600	(170.330.800)	PIS	PIS
4.02.15.117.	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	102.091.700	46.800.000	(55.291.700)	PIS	PIS
4.02.15.119.	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	Data CWP Hasil Penjaringan dan Data Potensi 6 Jenis Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	100 CWP	100 CWP	137.000.000	57.624.000	(79.376.000)	PIS	PIS
4.02.15.123.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	Tersedianya Data Piutang Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	72.000.000	43.700.000	(28.300.000)	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
4.02.15.124.	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	Terselenggaranya Pelaksanaan Reward Terhadap Wajib Pajak	Kabupaten Cirebon	50 WP	50 WP	440.000.000	104.406.700	(335.593.300)	PIS	PIS
4.02.15.134.	Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB	Tercapainya Penerimaan Pajak BPHTB	Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100 Prosen	550.000.000	95.848.600	(454.151.400)	PIS	PIS
4.02.15.135.	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlatihnya Wajib Pungut Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	400 Orang	400 Orang	183.515.100	-	(183.515.100)	PIS	
4.02.15.136.	Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	Terlatihnya Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	150 Orang	150 Orang	208.777.000	115.122.200	(93.654.800)	PIS	PIS
4.02.15.137.	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	245.000.000	135.042.000	(109.958.000)	PIS	PIS
4.02.15.138.	Kajian Pemetaan Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Bantuan serta Reklame	Tersedianya Data, Peta dan Aplikasi Yang berisi Objek Pajak, Calon Wajib Pajak dan Potensi Pajak	Kabupaten Cirebon	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	-	-	-		
4.02.15.139.	Peningkatan Pelayanan Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak	Kabupaten Cirebon	6 Jenis Pajak	6 Jenis Pajak	215.669.400	131.920.300	(83.749.100)	PIS	PIS
4.02.15.65.	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	Terpilihnya Wajib Pajak Teladan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	241.677.000	-	(241.677.000)	PIS	
4.02.15.66.	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Operasi Terpadu Penerimaan Pajak Daerah	Kabupaten Cirebon	4 Kali	4 Kali	296.418.900	128.007.200	(168.411.700)	PIS	PIS
4.02.15.71.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rutin	Kabupaten Cirebon	12 Bulan	12 Bulan	3.300.000.000	1.400.627.700	(1.899.372.300)	PIS	PIS
4.02.15.72.	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran Basis Data Pbb	Kabupaten Cirebon	100 Porsen	100 Porsen	787.346.900	514.691.000	(272.655.900)	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
4.02.15.78.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tersajinya Data Piutang PBB	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	-	-	-		
4.07.	PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH					64.702.700	13.640.700	(51.062.000)		
4.07.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah		100 Prosen	100 Prosen	64.702.700	13.640.700	(51.062.000)		
4.07.26.02.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati		11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	64.702.700	13.640.700	(51.062.000)	PIS	PIS
J U M L A H						9.869.712.800	5.029.575.300	(4.840.137.500)		

Sumber, 17 Juli 2020

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001